



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT TIM PELAKSANA**

**TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF INDONESIA**

Hari / Tanggal : Senin / 22 April 2013  
Waktu : 10:00 – 16.00  
Tempat : Ruang Banda B  
Hotel Borobudur  
Jl. Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat.  
Agenda : Pengesahan dan persiapan publikasi laporan final rekonsiliasi EITI Indonesia 2009

**Peserta Rapat**

Pemerintah

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Teguh Wiyono
2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Yanti Sukmayanti
3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ambar Indhiarni
4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Agus Cahyono Adi
5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Tobia Parulian
6. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Laode Sulaeman
7. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, SKK Migas, Ahmad Syakhroza
8. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, SKK Migas, Sujoko
9. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, SKK Migas, Desti Melanti
10. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, SKK Migas, Selvi
11. Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Dasto Ledyanto
12. Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Yon Aرسال
13. Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Kumara Candra
14. Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, David Tobing
15. Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Hantony M.
16. Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, M. Hijrah
17. Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat PNB, Evi Karmilah
18. Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat PNB, Erman Jayakusuma
19. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kuspradoto B.
20. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Koordinasi ESDM dan Kehutanan, Budi Utomo
21. PT. Pertamina, Dhaneswari Retnowardhani
22. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Timur, Edward Noviansyah

## Industri

1. Indonesian Mining Association, Hendra Sinadia
2. Indonesian Mining Association, Mukhlis

## NGO

1. IDEA, Wasingatu Zakiyah
2. IPC, Sulastio
3. PWYP, Resa Raditio
4. PWYP, Aryanto Nugroho

## Sekretariat EITI Indonesia

1. Sekretaris Tim Transparansi, Emy Perdanahari
2. Plh Wakil Sekretaris Tim Transparansi, Ambarsari Dwi Cahyani
3. Regulatory Specialist, Ronald Tambunan
4. Revenue Specialist II, Anita Pascalia
5. IT Specialist, M. Tri Wicaksono
6. Communication Specialist, Fajar Reksoprodjo
7. Staf Administrasi, Andri Hendro
8. Staf Administrasi, Yudha Ariadi
9. Staf Kedeputan III Kemenko Perekonomian, Malidu Ahmad
10. Staf Kedeputan III Kemenko Perekonomian, Yuliana
11. Staf Kedeputan III Kemenko Perekonomian, Hadi Purnama

## Bank Dunia

1. Advisor EITI Indonesia, David W. Brown

## Anggota Dewan EITI Internasional

1. Erry Riyana Hardjapamekas

## Rekonsiliator – KAP Gideon Ikhwan Sofwan

1. Ade Ikhwan
2. Christina Sutanto
3. Laurence Carey
4. Andhika Fauzan
5. Angga Hergunowo

## Pengamat:

1. Chandra Kirana

**Pimpinan Rapat** : Emy Perdanahari

## **Risalah Rapat**

Pimpinan Rapat membuka rapat pada pukul 10.30 WIB, dan menyebutkan butir-butir pembahasan rapat sebagai berikut (materi presentasi terlampir):

- 1) Ikhtisar (a) Penyelesaian Laporan, (b) Persiapan Publikasi, dan (c) Agenda Validasi EITI Indonesia
- 2) Presentasi Laporan Final Rekonsiliasi Tahun 2009
- 3) Pengesahan dan Persetujuan

Pimpinan rapat kemudian memaparkan agenda rapat butir (1), kemudian dilanjutkan dengan pemaparan butir (2) oleh Ambarsari Dwi Cahyani. Dalam paparannya, Ambarsari Dwi Cahyani menambahkan beberapa hal sebagai berikut:

- Pertamina juga telah memberikan masukannya terhadap draft Laporan Final, selain keenam entitas yang telah disebutkan dalam materi presentasi.
- Mengenai “Pernyataan Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur”, dinyatakan oleh KAP Gideon Ikhwan Sofwan bahwa isi pernyataan tersebut adalah pernyataan baku yang digunakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
- Revisi terhadap bagian Definisi dan Singkatan mendapat masukan dari entitas-entitas terkait dengan mengacu pada regulasi yang berlaku.
- Pertamina dimasukkan secara khusus dalam Bab 3 mengenai “Gambaran Industri Ekstraktif di Indonesia” karena, menurut rekonsiliator, Pertamina menjadi awal munculnya bisnis migas dan kegiatan sektor migas di Indonesia.

Kemudian peserta rapat mengemukakan pendapatnya mengenai pemaparan tersebut sebagai berikut:

Desti Melanti:

Kami sudah memberikan masukan untuk perbandingan data KKKS dan ESDM. Walaupun sudah disepakati dengan rekonsiliator untuk tidak menambahkan kolom penjelasan untuk masing-masing perbedaan di masing-masing KKKS, tapi mohon ditambahkan informasi sebagai *footnote* pada tabel 2.1 agar memberikan kejelasan kepada pembaca laporan.

Untuk bagian Kelengkapan dan Keakuratan Data, pada presentasi poin 3 dinyatakan “Kesalahan dalam mengisi pelaporan dengan menggunakan dasar akrual dan dasar kas”. Menurut kami yang terjadi adalah perbedaan pendekatan yang digunakan dalam pelaporan – dalam laporan kalimatnya sudah benar, hanya kalimat dalam materi presentasi saja yang kurang tepat.

Ade Ikhwan:

Concern kami adalah cut off 10 April. Sehingga perlu kami cek dulu apakah masukan tersebut masih masuk dalam cut off tersebut.

Emy Perdanahari:

Kalau bisa langsung disampaikan bunyi *footnote* nya seperti apa sehingga bisa langsung ditanggapi.

Desti Melanti:

Bunyi *footnote* yang kami inginkan: “Data volume Kontraktor KKS berdasarkan *accrual basis* sedangkan volume yang dilaporkan ESDM berdasarkan *cash basis*. Perbedaan volume diatas telah dilakukan rekonsiliasi, dimana terdapat koreksi dan penyelesaian serta penyesuaian data lifting tersebut di tahun 2010 setelah akhir tahun buku 2009.

Erry Riyana Hardjapamekas:

Ini adalah hal yang normal dalam suatu pelaporan, sehingga tidak ada alasan untuk menolak memasukkan penjelasan ini.

Laurence Carey:

Sebetulnya *settlement* diluar tahun 2009 adalah diluar ruang lingkup kami. Tapi bisa kami tambahkan informasi ini agar memberi kejelasan terhadap pembaca.

Evi Karmilah:

Ada beberapa masukan kami yang belum dikoreksi dalam laporan ini, contohnya bagian definisi PPh, kemudian tentang proses bisnis penerimaan migas.

Emy Perdanahari:

Akan kami cek lagi. Sebetulnya semua masukan sudah kami coba akomodir, tapi mungkin ada yang terlewat. Akan kita alokasikan waktu untuk mereview lagi sebelum persetujuan terhadap laporan.

Erry Riyana Hardjapamekas:

Yang direkonsiliasi adalah data 2009, jadi jika ada perubahan di tahun-tahun berikutnya itu adalah *subsequent events*. Sebaiknya rapat hari ini dapat menyetujui laporan ini supaya kita bisa melangkah ke laporan berikutnya.

Agus Cahyono Adi:

Kami setuju untuk segera menyelesaikan laporan ini, tapi jika hal-hal tadi belum dikoreksi kami khawatir akan menimbulkan salah persepsi terhadap pembaca.

Dalam bagian Kelengkapan dan Keakuratan data, kami keberatan dengan poin 1 tentang kajian yang kurang memadai dari level manajemen sepertinya tidak tepat.

Dasto Ledyanto:

Kami belum melihat penjelasan mengenai perbedaan antara pelaporan berdasarkan *cash* dan *accrual basis*. Sehingga perlu pemahaman yang sama agar tidak terulang dalam pelaporan berikutnya. Kalau memungkinkan dimasukkan dalam Ringkasan Eksekutif.

Ade Ikhwan:

Sudah kami jelaskan di awal laporan dan di Bab 4.

Erry Riyana Hardjapamekas:

Untuk bagian Kelengkapan dan Keakuratan Data poin 1 diganti menjadi "Pemahaman semua pihak yang belum sama", dan poin 3 diganti menjadi "Perbedaan dasar pelaporan antara *accrual* dan *cash basis*".

Mukhlis:

Tentang bagian Ringkasan Eksekutif Bab 2.2 dan 2.3, apakah data yang tidak bisa diberikan oleh DJP berarti tidak dianggap sebagai perbedaan/selisih?

Ade Ikhwan:

Betul.

Agus Cahyono Adi:

Klarifikasi atas data volume bulanan yang tidak diberikan oleh ESDM kepada rekonsiliator adalah karena laporan EITI adalah laporan tahunan, sehingga bukan dalam posisi ESDM untuk memberikan data bulanan, bukan karena ESDM tidak memiliki data tersebut.

Wasingatu Zakiyah:

Dalam Bab 4 diperlukan bagan alir mengenai bagaimana proses rekonsiliasi dilakukan. Juga perlu untuk mencantumkan mengenai keterbatasan yang ada dalam proses rekonsiliasi ini.

Emy Perdanahari:

Masukan-masukan akan diusulkan untuk pelaporan berikutnya, tapi untuk laporan saat ini tidak perlu diubah lagi agar laporan ini bisa disepakati saat ini.

Yon Aرسال:

Tolong dikonfirmasi apakah sudah ada penjelasan mengenai perbedaan data akibat perbedaan *cash vs accrual*.

Ade Ikhwan:

Sudah kami jelaskan dalam laporan.

Desti Melanti:

Dalam bagian 4.2.2 mengenai perbedaan Blok Mahakam dan Blok S&C Sumatera dan Rimau, sudah sudah kami berikan penjelasan secara rinci hari Jumat yang lalu. Namun yang termuat dalam laporan ternyata berbeda pemahamannya dengan yang sudah kami sampaikan penjelasannya. Mohon dapat dikoreksi supaya tidak terjadi kesalahpahaman.

Emy Perdanahari:

Akan kita adakan sesi khusus untuk merevisi hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Apakah bisa disetujui laporan ini terlebih dahulu sebelum baru kemudian direvisi, atau harus direvisi dulu baru bisa disetujui? Karena pada prinsipnya hanya masalah redaksional saja.

Desti Melanti:

Kami minta direvisi dulu karena ini sangat substansial menurut kami.

Erry Riyana Hardjapamekas:

Mengapa masukan-masukan tersebut tidak diakomodasi oleh rekonsiliator?

Ade Ikhwan:

Beberapa pertimbangan kami, diantaranya pemahaman kami yang mana menurut kami saat itu sudah cukup detail, namun jika dirasa masih perlu direvisi kami siap melakukannya.

David Brown:

Sebetulnya rekonsiliator sudah mempertimbangkan input dari SKK Migas, PNBPN dan Ditjen Migas. Rekonsiliator adalah independen, profesional dan punya pemahaman sendiri, sehingga rekonsiliator tidak dapat begitu saja mengubah laporan kecuali jika mereka yakin dengan dasar dari perubahan tersebut. Mudah-mudahan ada kompromi dalam proses revisi nanti.

Emy Perdanahari:

Kita berikan waktu 2 jam untuk melakukan revisi.

Rapat diskors selama 2 jam untuk merevisi laporan.

Kemudian rapat dilanjutkan kembali pada pukul 15.00 dengan hasil revisi sebagai berikut:

1. Bagian 1.2. halaman 13, mengenai Cakupan Kerja untuk Sektor Minyak dan Gas Bumi, informasi mengenai lifting pemerintah atas minyak dan gas bumi dan DMO minyak direvisi menjadi: Lifting Pemerintah atas minyak dan gas bumi yang dilaporkan pada Financial Quarterly Report kuartal IV tahun 2009 merupakan nilai setahun dalam Dolar Amerika Serikat atas lifting minyak dan gas bumi bagian Pemerintah tahun 2009 yang diperhitungkan berdasarkan provisional entitlement (termasuk didalamnya DMO minyak). Dalam hal perhitungan final entitlement (bagi hasil Minyak dan Gas Bumi antara Pemerintah dengan Kontraktor KKS) akan diselesaikan melalui mekanisme overlifting/underlifting.
2. Bagian 2.5.5 halaman 24, mengenai Audit atas FQR Kontrak Kerja Sama. Kalimat pertama diubah menjadi: BPMIGAS dan BPKP melakukan audit tahunan atas KKS yang sudah berproduksi, dengan ruang lingkup audit meliputi lifting minyak dan gas serta aspek cost recovery, termasuk ketaatan terhadap kebijakan akuntansi dan kebijakan-kebijakan lainnya sesuai dengan KKS, ketaatan terhadap ketentuan Perundangan-Undangan yang terkait dengan cost recovery dan ketaatan atas peraturan yang terkait dengan operasi kegiatan hulu minyak dan gas.

3. Bagian 4.2.2 halaman 46 mengenai Komentar atas rekonsiliasi untuk informasi pendapatan Pemerintah. Pada bagian penyesuaian di Blok Mahakam, Blok Rimau dan Blok S&C Sumatera diubah menjadi: Ada empat perbedaan atas lifting minyak dan gas bumi bagian Pemerintah dan DMO oil yang belum disesuaikan. Jumlah keempat perbedaan tersebut meliputi offset dari dua Kontraktor KKS untuk Blok Mahakam yaitu Total E&P Indonesia dan Inpex Corporation dengan nilai masing-masing sebesar 833 juta Dolar AS. Perbedaan pada Kontraktor KKS di blok Mahakam yang dilaporkan antara BPMIGAS dan Dit. PNBPN dikarenakan oleh penyajian pelaporan, dimana BPMIGAS melaporkan berdasarkan actual lifting secara konsolidasi (100% Total E&P Indonesia, sebagai Operator). Sedangkan Dit. PNBPN melaporkan sesuai persentasi alokasi untuk masing-masing pihak (50% Total E&P Indonesia dan 50% Inpex Corporation). Sedangkan untuk dua Kontraktor KKS di Sumatera, yaitu PT Medco E&P Rimau (Blok Rimau) dan PT Medco E&P Indonesia (Blok S&C Sumatra) yang dioperasikan oleh operator yang sama dengan nilai masing-masing sebesar 91 juta Dolar AS, sebagai akibat dari adanya perjanjian swap jenis minyak Kaji antara kedua belah pihak tersebut.
4. Bagian 5.1.1 mengenai Penyelesaian atas lifting Pemerintah – minyak dan kondensat. Paragraf kedua diubah menjadi: Penyelesaian oleh Pertamina atas jumlah terhutang kepada Pemerintah terkait pengiriman inter-area dilakukan dengan rekonsiliasi secara periodik oleh Tim SATKER yang beranggotakan BPMIGAS, ESDM, Pertamina, Bank Indonesia dan perwakilan Kementerian Keuangan. Dan paragraf ketiga diubah menjadi: Sebagian dari lifting minyak dan kondensat bagian Pemerintah yang di produksi oleh KKS terdapat bagian yang diekspor, dengan pertimbangan kilang Pertamina tidak dapat mengolah minyak mentah tersebut. Penyelesaian atas hasil ekspor langsung disetorkan ke Kas Negara di Bank Indonesia oleh penjual yang ditunjuk oleh BPMIGAS dan/atau pembeli sesuai dengan kontrak penjualan.

Kemudian peserta rapat menandatangani hasil revisi dan dengan itu dinyatakan bahwa Tim Pelaksana telah menyetujui Laporan EITI Tahun 2009.

Rapat selesai, dan Pimpinan Rapat menutup acara rapat pada pukul 17:00 WIB.